JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL

VOLUME 6 NUMBER 2, AUG 2022 | pp.232-239 | E-ISSN : 2581-2424 | P-ISSN : 2597-3657 |
Website: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/index
DOI: https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3592

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Syeni Rakhmadani[1*], Yuditya Wardhana[2], Ari Gusnita[3]

[1*,2,3]Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrai,
STISIPOL Dharma Wacana, Metro, Lampung, Indonesia
E-mail: syeni.rakhmadani@gmail.com[2], yuditya5290@gmail.com, [3]ari.gusnitadw@gmail.com

ABSTRAK

Hingga kini penanganan kemiskinan di Indonesia masih terus diupayakan dengan berbagai cara ataupun strategi penanganannya. Salah wujud penanganan dilakukan adalah dikeluarkanya kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai. Namun dalam implementasinya, masih banyak dijumpai permasalahan seperti tidak tepat sasaran data penerima BPNT, seperti kasus di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana. Dari total sebanyak 221 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdapat 39 KPM datanya tidak tepat kesasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi penyaluran BPNT di Desa Rantau Jaya Udik. Penelitian ini mengunakan digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penyaluran BPNT didesa Rantau Jaya Udik belum belum berjalan secara baik, dilihat dari karakteristik masalah, terlihat adanya ketidakvalidan data penerima manfaat yang didapat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos RI yaitu sebanyak 39 Keluarga Penerima Manfaat. Dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah memiliki kejelasan isi yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai serta adanya dukungan dari para pelaksana dan masyakat akan program ini. Dari sisi lingkungan, ekonomi dan social masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi masyarakat cukup rendah terlihat dari banyak KPM yang tidak mengerti dalam menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera

Kata Kunci: *Implementasi; Kebijakan; Bantuan Pangan Non Tunai*

ABSTRACT

Since now, the handling of poverty in Indonesia is still being pursued with various strategies for handling it. One of them is the issuance of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) policy which is based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2017 concerning the Distribution of Non-Cash Aid. However, in its implementation, there are still many problems such as recipients of aid who are not on target, such as the case that occurred in Rantau Jaya Udik Village, Sukadana District. From a total of 221 Beneficiary Families (KPM), there are 39 data that are not on target. The purpose of this study was to analyze how the implementation of BPNT distribution in Rantau Jaya Udik Village, Sukadana District, East Lampung Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of BPNT distribution in Rantau Jaya Udik Village has not run well, this can be seen from the characteristics of the problem, it can be seen that there are invalid beneficiary data obtained from the Integrated Data on Social Welfare of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, namely 39 Beneficiary

Diserahkan : 2022-06-11,
Direvisi : 2022-07-20,
Diterima : 2022-08-02,

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)

Families. In implementing this policy, the contents of this policy are clearly contained in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Distribution of Non-Cash Food Aid and support from the implementers and the community for this program. In terms of the environment, social, community economy and the level of technological progress of the community, it is quite low as seen from many KPMs who still do not understand in using the Prosperous Family Card.

Keywords: *Implementation; Policy; Non-Cash Food Aid*

PENDAHULUAN

Masalah mendasar yang sering dialami oleh negara banyak negara berkembang salah satunya adalah kemiskinan. Masalah – masalah terkait kemiskinan mulai dari cara pengentasan hingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sudah menjadi bahan kajian dan sudah di adaptasi diberbagai macam negara namun tidak membuahkan hasil yang signifikan, dalam perkembangnya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan sudah melampaui usia lebih 7 (tujuh) dekade semenjak merdeka masih dihadapi dengan masalah kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik pada maret 2021 tercatat sebanyak 10,14% penduduk miskin di Indonesia. Artinya masih ada sekitar 27,54 juta masyarakat Indonesia hidup di garis miskin

Kemiskinan merupakan suatu gambaran keadaan yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dalam aspek konsumsi dan pendapatan Pada hakikatnya, kemiskinan mempelihatkan suatu kondisi ketidakberdayaan ataupun kesengsaraan yang dialami seseorang, baik dari akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan suatu negara memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya(Jacobus et al., 2019). Oleh sebab itu, diperlukannya sebuah strategy untuk menurunkan angka kemiskinan dalam bentuk perlindungan social.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu dari contoh perlindungan social yang secara formal dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan BPNT merupakan bentuk transformasi dari Program Subsidi Rasta (Beras Sejahtera) yang sudah dimulai dari tahun 2017 yang system penyalurannya didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Sosial Secara Non Tunai. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT diberikan kepada masyarakaat miskin dalam hal ini yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Pada Tahun 2017, KPM merupakan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi berada ditingkat 25% terendah di daerah pelaksanaan. Penyaluran dilakukan melalui pembuatan akun eleltronik berupa dompet elektrik yang hanya diperutukan untuk pembelian bahan kebutuhan poko di pedagang (e-warung) yang telah melakukan kerjasama dengan bank yang ditunjuk. BPNT ini bertujuan membantu KPM dalam memenuhi keseimbangan gizi kebutuhan pokok, ketepatan waktu dan sasaran penerimaan, serta mendorong berkelanjutannya pembagunan dalam pencapaiannya.

Banyaknya Bantuan BPNT senilai Rp. 200.000,- / KPM / Bulan. Masyarakat tidak dapat mencairkan bantuan ini dalam bentuk uang tunai melaikan hanya dapat diambil dalam bentuk bahan kebutuhan pokok di E-Warung yang telah ditunjuk. Salah satu desa yang masyarakatknya mendapatkan BPNT adalah desa Rantau Jaya Udik dengan jumlah penduduk di tahun 2021 mencapai 1.985 jiwa. Sedang dari data yang diperoleh dilapangan julah KPM yang terdaftar di Desa Rantau Jaya Udik sebanyak 221 Orang. Namun dalam pelaksannya

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah
Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)

sebanyak 39 KPM tidak tepat sasaran. Adapun data yang didapat dalam penerimaan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik, ditunjukkan pada tabel 1. Data Penerima BPNT di Desa Rantau Jaya Udik

Tabel 1. Data Penerima BPNT di Desa Rantau Jaya Udik Tahun 2021

Dusun	Jumlah (KPM) Terdaftar	Jumlah KPM yang Tidak Tepat Sasaran	Jumlah Penerima (KPM)	Jumlah Beras (Kg/KPM)	Jumlah Telur (Butir/KPM)
1	56	9	47	376 Kg	282 Butir
2	43	7	36	288Kg	216 Butir
3	70	13	57	456Kg	342 Butir
4	52	10	42	336Kg	252 Butir
Jumlah	221	39	182	1.456 Kg	1.092 Butir

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial SIKS-NG Penerima Program BPNT Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Tahun 2021 (Hasil Observasi 2021)

Berdasarkan tabel diatas kebijakan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik terdapat 221 KPM tetapi tidak semua berhasil mendapatkan bantuan, dikarenakan ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah meninggal, merantau,pindah dan sebagian ada yang disebut *Malfunction* yaitu KPM yang terdaftar penerima BPNT tetapi KPM tersebut juga terdaftar menerima Bantuan PKH. Pelaksanaan Program BPNT di Desa Rantau Jaya Udik dilapangan masih juga terdapat tidak tepat sasaran, karena masih terdapat KPM katogori mampu malah mendapatkan BPNT, sedangkan yang tergolong tak mampu justru tidak mendapatkan BPNT. Dari berbagai permasalah diatas terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rantau Jaya Udik masih terdapat ketidaktepatan sasaran. Melihat fenomena tersebut, penulis mengambil judul untuk dilakukan sebuah penelitian berupa : "Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur"

KAJIAN TEORI

Kebijakan publik selalu menjadi isu sentral bagi banyak pihak karena dalam kebijakan publik melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses perumusan, implementasi ataupun dalam proses evaluasi daripada implementasinya (Luh ni, 2019). Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.(Nurdin, 2002)

Model kerangka analisis implementasi di kembangkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatiter yaitu keberhasilan implementasi akan dipengaruhi dalam 3 (tiga) indicator yaitu: (1) Karakteristik Masalah meliputi (a) Tingkat kesulitan teknis, hal ini melihat keberhasilan suatu program tergantung pada masalah social semakin tinggi tolak ukurnya maka semakin sulit tercapai karena dalam berberapa kasus ada permasalahan yang mudah dipecahkan namun terdapat juga kasus yang sulit dipecahkan. dan jumlah Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, semakin banyak populasi sasaran yang digunakan maka semakin sulit sebuah kebijakan untuk dapat diimplementasikan, akan tetapi kebijakan akan semakin muah untuk diimplemntasikan apabila jumlah sasaran yang dipakai tidak terlalu banyak; (2) Karakteristik

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah
Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.(CC BY-NC 4.0)

program atau kebijakan berkaitan dengan kejelasan isi program dalam hal ini melihat dukungan teoritis yang didasarkan, dilihat dari kejelasan isi kebijakan karena ini akan mempermudah implementator dalam menjalankan kebijakan yang dibuat dan seberapa besar dukungan dari berbagai institusi dan keterpautanya karena sering kegagalan kebijakan disebabkan miskordinasi baik yang dilakasanakan secara vertical maupun horizontal antar organisasi yang terlibat dalam kebijakan tersebut; dan (3) Variabel lingkungan, memliki beberapa karakteristik yang meliputi keadaan social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi serta dukungan publik dalam sebuah kebijakan (Subarsono, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif yang dipilih penulis untuk jenis penelitiannya dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik. Sedangkan penelitian kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantau Jaya Udik. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan masih terdapat masyarakatnya yang mendapatkan BPNT yang tidak masuk kriteria penerima BPNT sehingga ada indikasi tidak tepat sasaran.

Sumber data dipergunakan di penelitian ini adalah data primer yang didapat dari kumpulan sumber data hasil wawancara, observasi maupun diskusi serta mengunakan data sekunder yang didapat dari kumpulan sumber data yang sudah tersedia seperti buku, laporan dll buku, laporan dll. *Sampling purposif* dipergunakan dalam penelitian ini untuk menentukan sampel yany penetapanya didasarkan atas pengaruh yang memiliki hubungan erat dalam implementasi Kebijakan BPNT. Informan ditetapkan dalam penelitian sebanyak 8 (delapan) : (1) Informan Kunci yaitu orang sangat memahami permaslahan yang diteliti yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, 1 (satu) orang ketua e-waroeng, 1 (satu) orang sekertaris e-warung, 1 (satu) orang anggota e-warung; dan (2) Informan Pendukung berkaitan pemilihan orang yang mengetahui permasalahn yang diteliti yaitu penerima BPNT sebanyak 2 Orang.Teknik pengumpulan data yang di lakukan yakni teknik wawancara, pengobservasi langsung dan pendokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dengan melakukan pereduksian, penyajian dan penarikan kesimpulan. Data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan, lalu dilakukan klarifikasi dan kategorisasi atas dasar poin – poin dari permasalahan yang ingin dipecahkan melalui analisa data menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder kemudian mencari permasalahanya dan dianalisis dengan teori yang sesuai.

PEMBAHASAN

Implementasi BPNT di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dianalisis melalui 4 indikator yang dikembangkan teori implementasi oleh Mazmanian dan Sabatier meliputi:

1. Karakteristik Masalah

Implementasi Kebijakan BPNT di Desa Rantau jaya Udik ditahun 2021 secara teknis didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Tentang Penyaluran Pangan Non Tunai. Dalam pelaksanaan Program BPNT, Dinas Sosial, Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Badan Perencanaan Pembangnan Daerah (Bappenda) Kabupaten Lampung Timur melakukan kordinansi dan bersinergi secara penuh untuk keberhasilan

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah
Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)

kebijkan ini. Begitupun pelaksanaan kebijakan BPNT ditingkat bawahnya seperti di Kecamatan dan Desa aparatur setempat yang didamping Pendamping BPNT sangat mendukung.Kebijakan BPNT di desa Rantau Jaya Udik, pendamping terdiri dari Tenaga Kesejehateraan Sosial Kecamatan, pendamping PKH serta pendamping sosial lainnya. Setelah jumlah calon KPM diketahui pada setiap lokasi penyaluran, Bank penyalur akan melakukan identifikasi agen bank untuk dapat menjadi e-warong yang akan mennyalur kebijakan BPNT(Gustin, 2019).

Pelaksanaannya terdapat sebanyak 221 Keluarga terdaftar Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Program BPNT. Secara kolektif, KPM akan melakukan pembukaan rekening di bank penyalur yang telah melakukan kerjasama dengan kementerian sosial. Pembukan rekening penerima manfaat diikuti pembukaan Uang Elektronik yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan bantuan di e-warung yang telah melakukan kerjasama dengan bank. Nominal bantuannya adalah Rp. 200.000,- / KPM / Bulan. Namun, nominal tersebut tidak diambil secara tunai tapi diganti dengan bahan kebutuhan pokok yaitu 8 Kg Beras dan 6 butir telur untuk masing - masing KPM.

Namun secara teknis, implementasi kebijakan ini masih menemui kesulitan yakni berkaitan dengan data KPM yang terdaftar dari pusat. Data yang terdaftar ada sebanyak 221 namun dalam pelaksanaanya hanya 182 KPM yang menerima bantuan hal ini dikarenakan data yang digunakan diambil dari pemutahiran data tahun 2015 yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) Badan Pusat Statistik. Ketidakmutahiran data tesebut terdapat 39 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sasaranya tidak tepat. Ditunjukan pada Tabel 2 Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Tidak Tepat Sasaran Tahun 2021.

Tabel 2. Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Tidak Tepat Sasaran Tahun 2021

Dusun	Jumlah (KPM) Terdaftar	Jumlah Penerima (KPM)	Jumlah (KPM) Meninggal	Jumlah (KPM) Merantau	Jumlah (KPM) Pindah	Jumlah (KPM) Mulfuntion
1	56	47	0	0	0	4
2	43	36	2	1	2	5
3	70	57	3	3	3	6
4	52	42	3	1	2	4
Jumlah	221	182	8	5	7	19

Sumber : Data Terpadu Kesejahteran Sosial SIKS-NG Penerima Program BPNT Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Tahun 2021 (Hasil Observasi 2021)

Data tersebut menunjukan dari 221 data yang terdaftar hanya 182 yang berhasil menerima bantuan 39 KPM gagal menerima. Hal ini diakibatkan ada KPM yang sudah meninggal, merantau, pindah dan sebagaian ada yang disebut sebagai KPM "multifunction" dimana adanya KPM yang mendapatkan Program PKH dan juga mendapatkan Program BPNT. Selain itu, kesulitan teknis yang sering dihadapi dalam Implementasi Kebijakan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik adalah kendala jaringan / signal. Hal ini terjadi pada saat pengesekan Kartu Pangan milik KPM dengan Mesin EDC bank penyalur yang sering mengalami ganguan sehingga sering menghambat proses penyaluran bantuan.

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah
Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)

Penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran kelompok penerima kebijakan BPNT merupakan keluarga yang kondisi sosial ekonomi 25% terendah didesa tersebut yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di Desa Rantau Jaya Udik terdapat 597 Kepala Keluarga (KK) dengan total penerima yang berhasil mendapatkan bantuan sebanyak 182 KK atau sekitar 30%, ini menunjukan jumlah penerima manfaat di Desa Ranjau Jaya Udik Kecamatan Sukadana berada diatas target penyaluran bantuan. Kondisi kehomogenan penerima manfaat yang dapat diartikan sebagai persamaan tingkat sosial ekonomi yang rendah akan cenderung berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijkan. Masalah – masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya merupakan berberapa contoh masalah sosial yang relative sulit dipecakhan (Khalisah et al., 2020).Oleh karena itu, masalah – masalah sosial akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari sebuah kebijakan. Semakin besar masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat penerima kebijakan maka tolak ukur keberhasilan akan semakin sulit tercapai hal ini dikarenakan akan banyak permasalahan yang sangat sulit dipecahkan oleh masyarakat tersebut.

2. Karakteristik Program/Kebijakan

Karakteristik kebijkan dilihat dari sisi kejelasan isi kebijkan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kebijakan akan semakin mudah diimplementasikan apabila rincian dan isi kebijakan semakin jelas, hal ini dikarenakan seorang implementator akan mudah menginterpretasikanya dan memahami secara nyata dalam sebuah tidnakan ataupun.sebaliknya, namun isi kebijakan yang tidak memiliki kejelasan akan melahirkan permasalahan dalam mengimplementasikannya (Khalisah et al., 2020).Kejalasan dari isi peraturan kebijkan BPNT yang di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdapat pada BAB I Pasal 2 ayat 1, dimana BPNT bertujuan untuk : (1) mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (2) memberikan tambahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT; (3) memberikan bahan pangan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan (4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan (Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2019).Meskipun kebijakan BPNT telah memuat isi yang sangat jelas di jabarkan dalam peraturanya namun dalam pengimplementasianya masih banyak pengurus e-warung yang belum memahaminya. Walaupun pengurus e-warong belum memahami isi dari peraturan permensos tersebut, tetapi mereka selalu diarahkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang lebih memahami tujuan dan mekanisme penyaluran Kebijakan BPNT.

Dukungan antar berbagai institusi pelaksana serta keterpautanyapun sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan BPNT ini. Kesedian para implementator untuk saling berkoordinasi guna mencapai tujuan bersama. Keterpatutan dan dukungan antar berbagai implementator dari berbagai instusi pelaksana terlihat dari jalinan komunikasi yang dibangun sangat baik antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), aparat pemerintahan desa dan juga dengan pengurus e-warong sehingga dalam pelaksanaanya selama ini kebijakan BPNT yang dilaksanakan di Desa Rantau Jaya Udik tidak pernah terjadi diskomunikasi yang menimbulkan sebuah masalah. Serta adanaya dukungan berupa kerjasama yang baik antar

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah
Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)

pengurus e-warong dalam penyaluran Kebijakan BPNT, begitu juga antara pengurus e-warong dengan KPM juga selalu berkoordinasi sehingga tidak terjadi permasalahan.

3. Variabel Lingkungan

Satu indikator mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaikan keberhasilan suatu kebikajakan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari kondisi lingkungan ekonomi social masyarakat dan tingkat kemajuan. Bawasanya ketidakkondisifan lingkungan ekonomi sosial dapat menjadikan kinerja implementasi kebiakan menjadi bermasalah. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan mensyaratkan adanya kondisi ligkungan eksternal yang kondusif(Pathony & Deda, 2020). Dari hasil penelitian, lingkungan Kebijakan BPNT di Desa Rantau Jaya Udik sebagaimana disampaikan oleh Bapak Agus Saleh selaku Kepala Desa Rantau Jaya Udik bawasnya Sosial ekononomi dan teknologi merupakan pengaruh yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program BPNT dimana faktor ekonomi dan pengetahuan masyarakat penerima BPNT Desa Rantau Jaya Udik masing cukup rendah. dalam pengimplementasianya dijumpai masih banyak KPM yang awam dan kebingungan dalam menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan kartu debit kartu debit berfungsi sebagai dompet uang elektronik. Karena pada kebijakan sebelumnya dalam pengambilan bantuan beras tidak menggunakan kartu apapun, jadi banyak KPM merasa lebih sulit tentang tata cara penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Namun dalam pengimplementasianya, dukungan publik terhadap kebijakan BPNT ini sangat mendapatkan dukungan publik dari masyarakat Desa Rantau Jaya Udik, karena masyarakat terbantu dalam hal memenuhi kebutuhan pangan dengan adanya kebijakan BPNT karena beras yang disalurkan dari kebijkan ini berasnya enak, pulen, dan bersih dan dapat tambahan telur juga.

KESIMPULAN

Implementasi BPNT Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana belum berjalan dengan baik. Terlihat dari (a) Karakteristik masalah yang dilihat tingkat kesulitan teknis dari implementasi penyaluran Kebijakan BPNT terdapat sedikit kendala yaitu ketidakvalidtan data yang terdaftar pada Data Tepadu Kesejahteraan Sosial Kementrian Republik Indonesia tercatat sebanyak 221 KPM namun yang berhasil menerima manfaat hanya sebanyak 182 KPM dan 39 data yang tidak valid. (b) Karakteristik Program/Kebijakan, dilihat dari kejelasan isi dari kebijakan Program BPNT sudah jelas yang di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan implementasi penyaluran BPNT ini didukung kuat atar institusi pelaksana hal ini terlihat dari komunikasi antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, aparat pemerintahan desa dan juga dengan pengurus e-warong selama ini sudah sangat baik. (3)Variabel lingkungan melihat Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi cukup rendah terlihat dari banyak KPM yang masih awam dan tidak mengerti dalam menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera yang merupakan kartu debit berfungsi sebagai dompet uang elektronik dan dukung publik dalam Program BPNT ini ini sangat mendukung karena adanya BPNT ini masyarakat merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah
Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratihstyastuti, (2021) "*Implementasi Kebijakan Publik*". Yogyakarta. Gava Media.

Buku Pedoman Umum BPNT Tahun 2020

Hampfa, Harsono, (2002). "*Implementasi Kebijakan dan Politik*" Jakarta, Bhineka Cipta.

Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. CV Sinar Baru.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (2019).

Subarsono, S. (2010). *Amalisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Artikel Jurna dengan DOI

Gustin, G. (2019). Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan. *Mawa'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, *10*(2), 376–397. https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745

Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *19*(7). https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018

Khalisah, U. N., Puspaningrum, I. I., & Yuliastina, R. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMENEP N0. 14 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). *Public Corner*, *15*(2), 25–37. https://doi.org/10.24929/fisip.v15i2.1170

Luh ni, D. yulyana. (2019). Dinamika Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *2*(2), 200–210. https://journal.undiknas.ac.id

Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. CV Sinar Baru.

Pathony, T., & Deda, C. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, *1*(2), 187–205. https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i2.743

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah
Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)